



TESIS

ANALISIS HUKUM OTORITAS JABATAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN LELANG KEPAILITAN

DISUSUN OLEH:
CHRISTOPHER KENDRICK ADAM
NIM.217221053

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**ANALISIS HUKUM OTORITAS JABATAN NOTARIS
DALAM PELAKSANAAN LELANG KEPAILITAN**

TESIS

**Diajukan untuk Mengambil Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Universitas
Tarumanagara**

**DISUSUN OLEH:
CHRISTOPHER KENDRICK ADAM
NIM.217221053**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023**

Pengesahan

Nama : CHRISTOPHER KENDRICK ADAM
NIM : 217221053
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul Tesis : Analisis Hukum Otoritas Jabatan Notaris Dalam Pelaksanaan Lelang Kepailitan
Title : Legal Analysis of The Authority of a Notary in a Bankruptcy Auction

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi MAGISTER KENOTARIATAN Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S.,MH., Dr.
2. RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
3. TJEMPAKA, S.H., M.H., M.Kn., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



Jakarta, 18-Januari-2024
Ketua Program Studi



MIA HADIATI, S.H., M.Hum.

Persetujuan

Nama : CHRISTOPHER KENDRICK ADAM
NIM : 217221053
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Analisis Hukum Otoritas Jabatan Notaris Dalam Pelaksanaan Lelang Kepailitan

Proposal Tesis ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 13-Desember-2023

Pembimbing:
RASJI, Prof.Dr.,S.H., M.H.
NIK/NIP: 10291008



ABSTRAK

- (A) Nama : Christopher Kendrick Adam
(B) Judul : Analisis Hukum Otoritas Jabatan Notaris
Dalam Pelaksanaan Lelang Kepailitan
(C) Halaman : 162 Halaman+2023
(D) Kata Kunci : Otoritas Jabatan Notaris, Akta Otentik, Lelang
Kepailitan
(E) Isi Abstrak :

Penelitian ini mengkaji permasalahan dualisme subjek hukum terkait kewenangan dalam melakukan tindakan hukum lelang, dimana Notaris memiliki kewenangan membuat akta risalah lelang berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun ketika Notaris diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II, kewenangannya dalam membuat risalah lelang kepailitan menjadi tidak jelas sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.06/2017. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengacu kepada aspek hukum positif yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian adalah dampak yang signifikan terutama terkait efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembuatan risalah lelang kepailitan. Legalitas Notaris Dalam Kewenangan Membuat Akta Otentik Dalam Prosedur Lelang Kepailitan adalah tentang kewenangan Notaris dalam melaksanakan lelang noneksekusi sukarela sesuai dengan Pasal 5 PMK Nomor 213 Tahun 2020. Lelang mencakup berbagai jenis barang, termasuk barang BUMN/D, perusahaan dalam likuidasi, badan layanan umum/badan hukum pendidikan, dan lainnya. Proses lelang diatur, termasuk kewenangan Kantor Pejabat Kelas II, persyaratan lelang, dan pengumuman lelang. Ada juga ketentuan khusus untuk lelang kepailitan oleh Pejabat Lelang Kelas II, dengan tanggung jawab etis dan kewajiban terhadap pembayaran lelang, pajak, dan lainnya. Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah berperan dalam pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Lelang Kelas II, dengan sanksi yang dapat diterapkan jika melanggar ketentuan yang berlaku.

- (F) Daftar Acuan : 17 (2001-2021, 4 Peraturan Perundang-
Undangan, 7 Artikel/jurnal)
(G) Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H
(H) Penulis : Christopher Kendrick Adam

Abstract

- (A) Name : Christopher Kendrick Adam
(B) Titles : Legal Analysis of the Notary
in Bankruptcy Auction Implementation
(C) Pages : 162 pages +2023
(D) Keywords : Notary Authority, Authentic Deeds, Bankruptcy
Auction

- (E) Abstract :

This study examines the issue of dualism of legal subjects related to the authority to perform legal auction actions, where a Notary has the authority to draft auction minutes based on the Notary Law. However, when the Notary is appointed as a Class II Auctioneer, their authority to draft bankruptcy auction minutes becomes unclear in accordance with the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 189/PMK.06/2017. The research method used is normative juridical with reference to applicable positive legal aspects. This research uses a statutory approach and a conceptual approach. The research results have a significant impact, especially regarding efficiency, legal certainty and protection of the interests of various parties involved in the process of preparing bankruptcy auction minutes. The Legality of Notaries in the Authority to Make Authentic Deeds in Bankruptcy Auction Procedures is about the authority of Notaries in carrying out voluntary non-execution auctions in accordance with Article 5 PMK Number 213 of 2020. Auctions cover various types of goods, including BUMN/D goods, companies in liquidation, public service agencies/ educational legal entities, and others. The auction process is regulated, including the authority of the Class II Officer's Office, auction requirements, and auction announcements. There are also special provisions for bankruptcy auctions by Class II Auction Officials, with ethical responsibilities and obligations regarding auction payments, taxes, etc. The Director General and Head of Regional Offices play a role in coaching and supervising Class II Auction Officials, with sanctions that can be applied if they violate applicable regulations.

- (F) Reference List : 17 (2001-2021, 4 Legal Regulations, 7
Articles/Journals)

- (G) Pembimbing : Prof. Dr. Rasji, S.H., M.H

- (H) Penulis : Christopher Kendrick Adam

Kata Pengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “ ANALISIS HUKUM OTORITAS JABATAN NOTARIS DALAM PELAKSANAAN LELANG KEPAILITAN”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Magister Kenotariatan. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.Kn., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
- 2 Dr.Rasji, S.H, M.H., dan seterusnya, selaku Dosen Pembimbing Penulisan Tesis;
3. Segenap Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian ini.

Selain untuk memenuhi syarat menempuh gelar Magister Kenotariatan, penulis berharap agar Tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum yang mengatur lelang kepailitan

Jakarta, 20 Desember 2023

Christopher Kendrick Adam

Pernyataan

Nama : CHRISTOPHER KENDRICK ADAM
NIM : 217221053
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Judul : Analisis Hukum Otoritas Jabatan Notaris Dalam Pelaksanaan Lelang Kepailitan

Dengan ini menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau keglatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2023

Yang menyatakan



CHRISTOPHER KENDRICK ADAM
NIM. 217221053

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN	viii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian	7
1. Tipe Penelitian	7
2. Spesifikasi Penelitian	7
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	8
4. Pendekatan Masalah	9
5. Teknik Analisis Data	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12

A. Konsep Jabatan Notaris	12
B. Konsep Hukum Kepailitan.....	39
C. Teori Kepastian Hukum.....	64
D. Teori Keadilan.....	79
E. Teori Kewenangan.....	81
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	83
A. Legalitas Notaris Dalam Kewenangan Membuat Akta Otentik Dalam Prosedur Lelang Kepailitan.....	83
B. Kewenangan Lelang Kepailitan Oleh Pejabat Lelang Kelas II Dalam Membuat Akta Otentik Risalah Lelang Kepailitan	92
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	97
A. Peran Dan Kedudukan Notaris Dalam Kewenangan Membuat Akta Otentik Dalam Prosedur Lelang Kepailitan.....	97
B. Dampak Pelaksanaan Lelang Kepailitan Oleh Pejabat Lelang Kelas II Dalam Membuat Akta Otentik Risalah Lelang Kepailitan	126
BAB V PENUTUP	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Daftar Singkatan

PMK	Adalah Peraturan Menteri Keuangan
BUMN	Adalah Badan Usaha Milik Negara

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing
Lampiran 3	: Rekap Bimbingan Tesis
Lampiran 4	: Surat Keterangan Turnitin dan Hasilnya
Lampiran 5	: <i>Letter of Acceptance Jurnal</i>